

Press Release: 30 Desember 2015

Mendesak Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Orang Asli Papua

Presiden RI, Joko Widodo, merencanakan kunjungan ke tanah Papua, agendanya antara lain: mengunjungi Pabrik Sagu milik PT. Perhutani di Kais dan PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) di Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan dan menyambut akhir tahun di Raja Ampat (Papua Barat Pos, 29 Desember 2015).

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua mengapresiasi kunjungan Presiden RI Jokowi ke tanah Papua, tetapi sangat disayangkan jika kehadiran negara dari kunjungan bapak Presiden tersebut hanya bermakna untuk mempromosikan dan mengjustifikasi keberadaan proyek-proyek pembangunan dan aktivitas perusahaan yang mengekstraksi kekayaan sumber daya alam Papua saja.

Bagaimanapun masih banyak masalah, paradigma dan fasilitasi kebijakan terhadap proyek-proyek pembangunan dan ekstraksi kekayaan sumber daya alam di tanah Papua masih sama seperti dulu sebelum adanya status kekhususan otonomi Papua, yang mana belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan bahkan bertentangan melanggar hak-hak konstitusional warga, khususnya orang asli Papua.

Paradigma pertumbuhan ekonomi berskala besar dan berbasis modal besar, fasilitasi dan kendali kebijakan terpusat, serta pendekatan keamanan dalam praktiknya telah menimbulkan konflik kekerasan dan pelanggaran HAM yang tak henti, meningkatnya gap ekonomi kemiskinan dialami penduduk asli akar rumput dan memperkaya segelintir pemodal, kerusakan lingkungan yang meluas, meningkatnya penghancuran sumber pangan, pembatasan akses dan ruang kehidupan masyarakat adat, kriminalisasi masyarakat adat Papua terjadi, tidak adanya rasa aman dan kebebasan berarti. Contoh kasus, PT. ANJ memberikan ganti rugi pada pohon sagu sebesar Rp. 800 per pohon, dibandingkan dengan nilai hasil tepung sagu yang dikelola rakyat harganya mencapai Rp. 1 juta per pohon. Pemberian ganti rugi yang rendah dan tidak adil ini, sumber konflik, sumber kerusakan hutan dan gambut didaerah ini, serta menggambarkan tidak adanya penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Aparat keamanan dan ancaman penangkapan digunakan perusahaan untuk meluluhkan dan menekan aspirasi masyarakat. Setahun terakhir ini, diidentifikasi sudah ada 4 (empat) orang warga pemilik tanah dilokasi anak perusahaan PT. ANJ yang dikriminalisasi dipenjarakan karena aksi protes perampasan lahan mereka.

Karenanya, kami mendesak kepada Presiden RI maupun pemerintah di daerah untuk mengeluarkan dan sungguh-sungguh menjalankan kebijakan dan program-program pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar orang asli Papua, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kami mendesak Presiden Jokowi melakukan review atas izin-izin konsesi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, hutan tanaman industri, konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan ijin pertambangan, yang melanggar Undang-undang dan hak orang asli Papua, seperti cara-cara melakukan pengrusakan dan pembakaran hutan, cara-cara mencatat nama Presiden, Menteri dan Pejabat tertentu di daerah untuk menguasai dan menggerogoti kekayaan alam yang merugikan negara dan merampas hak masyarakat. Berikan sanksi dan pencabutan izin sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kami mendesak pula Presiden Jokowi untuk secara khusus memimpin pelaksanaan review terhadap RTRW Provinsi Papua Barat yang tidak berpihak pada masyarakat adat Papua dan ruang hidupnya, segera lakukan konsultasi bertingkat dan meluas dari akar

rumpit, serta memastikan adanya perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua dan adanya pengamanan atas sumber kehidupannya.

Hormat kami,

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua: PUSAKA di Jakarta, Greenpeace Indonesia di Sorong, Perkumpulan Belantara Papua di Sorong, Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian di Sorong, Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Iwaro di Sorong, Forum Sinagi Lembah Bersua di Sorong, AMAN Sorong Raya di Sorong, LMA Kanasimos di Sorong Selatan, AKAWUON di Tambraw, Yayasan PARADISEA di Manokwari, KAMUKI di Manokwari, Papuana Conservation di Manokwari, JASOIL di Manokwari, LP3BH di Manokwari, Solihin di Manokwari, Perkumpulan Bin Madag Hom di Bintuni, Gemapala di Fakfak, Dewan Adat Papua Mbaham Matta di Fakfak, Jaringan Perempuan Fakfak, AJI Papua di Fakfak.

Kontak Person:

Y.L. Franky (HP. 0813 1728 6019)

Max Binur (HP. 0813 2934 8518)

Esau Yaung (HP. 0812 4816 2018)

George Dedaida (HP. 0813 4417 8277)

Yohanis Akwam (HP. 082197709148)

Jembris (HP. 0821 3673 8161)

Charles Tawaru (HP. +6281247959331)